



# Pamong Dilarang Jadi Pengurus Koperasi

## ■ Pemkab Bantul Dorong Kalurahan Segera Musyawarah Pembentukan Kopdes Merah Putih

**BANTUL, TRIBUN** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mendorong pihak kalurahan untuk segera menggelar musyawarah pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemerintah kalurahan disarankan untuk menggandeng pengusaha dalam pembentukan koperasi tersebut.

Ditargetkan akhir Mei 2025 ada 75 kalurahan yang sudah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) pembentukan Kopdes Merah Putih. "Pembentukan Kopdes Merah Putih itu disarankan mengajak para pengusaha, jangan hanya pamong dan sebagainya. Karena, nanti yang bergerak adalah usaha dan untuk pamong dilarang menjadi pengurus Kopdes Merah Putih," jelas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul, Fenty Yusdayati, Minggu (25/5).

Menurutnya, tugas pamong adalah fokus melayani masyarakat. Kemudian, dari segi aturan, pengurus Kopdes Merah Putih berasal dari warga kalurahan dan tidak boleh ada unsur pemimpin desa, untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan koperasi oleh warga setempat.

"Saat ini untuk koperasi yang sedang dibentuk adalah *pure* baru dibentuk. Kemarin kan kita mau melibatkan koperasi unit desa (KUD) dan Koperasi Mina Bahari menjadi Kopdes Merah Putih, tapi ternyata anggotanya sudah antardesa. Jadi, tidak bisa dan tidak cocok dengan aturan pendirian Kopdes Merah Putih," paparnya.

Lebih lanjut, pembentukan baru Kopdes Merah Putih, juga dinilai cukup cepat dan tidak memakan waktu lama dibandingkan menggunakan koperasi yang sudah ada. Kini pihaknya

### UNTUK KEMANDIRIAN

- Pemkab Bantul mengajak masing-masing kalurahan atau desa untuk menggandeng pelaku usaha untuk melancarkan pembentukan Kopdes Merah Putih.
- Pengurus Kopdes Merah Putih berasal dari warga kalurahan dan tidak boleh ada unsur pemimpin desa, untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan koperasi oleh warga setempat.
- Pembentukan baru Kopdes Merah Putih, juga dinilai cukup cepat dan tidak memakan waktu lama dibandingkan menggunakan koperasi yang sudah ada.

memasrahkan setiap kalurahan untuk tetap mempersiapkan maupun menjalankan musyawarah pembentukan Kopdes Merah Putih.

"Yang jelas, tujuan pembentukan Kopdes Merah Putih ini bagus untuk meningkatkan ekonomi setempat. Lalu, peran kami hanya membiayai pengurusan akte pembentukan Kopdes Merah Putih di notaris serta pelatihan menjalankan dan memasarkan koperasi yang sehat," tutur dia.

Sejauh ini, Pemkab Bantul menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pengurusan akte pembentukan Kopdes Merah Putih serta pelatihan menjalankan dan memasarkan koperasi sehat pada tahap pertama tahun 2025 mencapai Rp200 juta. "Rp200 juta pada tahap pertama saja didapatkan dari pergeseran dana efisisiensi kemarin. Jadi, akan ada dana dari APBD tahap

kedua yang dibahas dalam perubahan 2025. Nah, nanti kalau koperasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sudah terbentuk, sudah eksis, maka pinjaman modal dari pemerintah bisa masuk untuk mendukung usaha Kopdes Merah Putih," tandas dia.

Kopdes tak melulu menggunakan modal anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menyebut, modal Kopdes Merah Putih itu bermacam-macam. Beberapa di antaranya merupakan simpanan wajib pokok, simpanan sukarela, simpanan pokok, pinjaman hibah, dan lain sebagainya. "Tapi, sekarang kita pakai yang simpanan wajib pokok dulu. Kalau ada yang sukarela ya *enggak* apa-apa," katanya.

### Pengawas

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan, setelah koperasi terbentuk, pemerintah kalurahan akan menjadi pengawas, terutama dalam langkah-langkah penataan organisasinya. "Mulai dari berapa simpanan pokok atau iuran pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela bisnisnya apa saja, tapi tentu tidak bisa cepat, nanti bersama Pemkab akan didampingi, dan koperasi ini harus hidup," kata dia.

Selain dari pemerintah daerah, kata Halim, pembentukan Kopdes Merah Putih juga dimungkinkan mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. "Jadi, sudah dibantu pemerintah dan nanti mungkin ada beberapa bantuan dari pusat agar koperasi ini mendapat SHU (sisa hasil usaha), SHU-nya dibagi ke seluruh anggota untuk kesejahteraan anggota, ini perintah Presiden," pungkas dia. **(nei)**